

Workshop Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal

Friday, 04 November 2011 WIB, Oleh: Agung



Permasalahan desa atau daerah tertinggal tentu tidak terlepas dari persoalan perdesaan dan kemiskinan. Oleh karena itu membahas desa atau daerah tertinggal berarti membahas kondisi terkait ketahanan sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. Kalaupun berbagai permasalahan desa atau daerah tertinggal terutama yang berbatasan dengan negara tetangga atau pulau terluar Indonesia muncul akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa permasalahan tersebut memberikan tekanan tersendiri terhadap kondisi geopolitik, ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain itu berbagai persoalan terkait pula dengan keterbelakangan pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda. "Untuk itu Fakultas peternakan UGM berusaha memberikan sedikit masukan dan solusi, serta mengurai kekusutan masalah di daerah tertinggal baik ditinjau dari aspek akademik maupun pendekatan teori," ujar Dekan, Prof. Dr. Ir. Tri Yuwanta, S.U, DEA di Auditorium Fakultas Peternakan UGM, Kamis (3/11).

Berbicara pada workshop nasional "Sinergitas Nasional Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal : Peternakan Sebagai Penggerak Ekonomi" hasil kerjasama Fakultas peternakan UGM dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Tri Yuwanta mengungkapkan berbagai sudut pandang dapat dipergunakan untuk menelaah pembangunan daerah tertinggal. Bahwa pembangunan daerah tertinggal dipandang sebagai suatu proses yang bertumpu pada potensi daerah yang dimiliki dan kemampuan koheren masyarakatnya dalam rentang waktu yang panjang. "Untuk itu perubahan yang timbul dari perubahan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan tata kehidupan ekonomi, pola hubungan masyarakat, dinamika budaya serta pola pengambilan keputusan oleh masyarakat," papar Dekan.

Menurut Tri Yuwanta perubahan dari desa tertinggal menjadi desa prasejahtera, dan kemudian menjadi daerah sejahtera tentu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menciptakan surplus pendapatan bagi masyarakat untuk kemudian diinvestasikan kembali dalam pembangunan desa tersebut, sehingga menimbulkan multiple effect terhadap sektor lain.

Sedikitnya empat hal yang perlu diperhatikan guna melihat pembangunan daerah tertinggal sebagai suatu proses. Diantaranya diperlukan identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi masyarakat perdesaan, dan penerapan strategi mata rantai saling membutuhkan untuk pembangunan desa tertinggal dan perkotaan. "Selain itu dibutuhkan langkah-langkah penyempurnaan untuk mengoptimalkan pembangunan desa, serta berbagai peran dari para cerdik pandai, termasuk peran Fakultas Peternakan UGM dalam mendukung pembangunan masyarakat desa tertinggal," jelasnya. (Humas UGM/ Agung)

Berita Terkait

- [UGM dan KPDT Garap Lahan Tidur di Daerah Tertinggal](#)
- [Terapkan Hasil Riset, Sarjana Harus Kembali Ke Desa](#)
- [Workshop Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal](#)
- [Kementerian PDT Jajaki Peluang Kerja Sama Dengan Fakultas Peternakan UGM](#)
- [Fakultas Pertanian-Kementerian PDT Kerja Sama Program Bedah Desa](#)